



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASLEKHAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER
3. NHK : 972869

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.198.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/23 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/20 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/50 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/20 m2 di KAB / KOTA PETAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 133.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.500.000
1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 500.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	124.307.250
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.422.807.250



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.422.807.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.